

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG

EVALUASI RENCANA KERJA TRIWULAN IV TAHUN 2022



KESBANGPOL
PROVINSI LAMPUNG

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) triwulan IV Tahun Anggaran 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung telah disusun dan dilaksanakan selama kurun waktu Januari s.d. Desember Tahun 2022 memuat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dituangkan kedalam program dan kegiatan Tahun 2022.

Diharapkan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (RENJA) Perubahan triwulan IV Tahun 2022 ini dapat menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi yang berimplementasi kepada tugas pokok dan fungsi lembaga secara optimal, serta menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada kurun waktu Januari s.d. Desember 2022.

Bandar Lampung, Januari 2023

KEPALA BADAN



Drs. M. FIRSADA, M. Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19670515 198901 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- | | |
|------------------------------------|------------|
| <i>A. LATAR BELAKANG</i> | <i>I-1</i> |
| <i>B. DASAR HUKUM</i> | <i>I.2</i> |
| <i>C. MAKSUD DAN TUJUAN</i> | <i>I-3</i> |
| <i>D. RUANG LINGKUP</i> | <i>I-4</i> |
| <i>E. SISTEMATIKA PENULISAN</i> | <i>I-4</i> |

<i>BAB II PERSANDINGAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RENJA PERUBAHAN TAHUN 2022 DENGAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH</i>	<i>II.1</i>
--	-------------

BAB III CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

- | | |
|--|---------------|
| <i>A. KESESUAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB
KEGIATAN ANTARA RENJA PERUBAHAN PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2022 DENGAN APBD TAHUN 2022</i> | <i>III.1</i> |
| <i>B. REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN RENJA
PERUBAHAN SKPD TRIWULAN IV TAHUN 2022</i> | <i>III-4</i> |
| <i>C. REALISASI ANGGARAN</i> | <i>III-16</i> |
| <i>D. PRESTASI DAN PENGHARGAAN</i> | <i>III-17</i> |

BAB IV HAMBATAN DAN KENDALA

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| <i>A. HAMBATAN DAN KENDALA</i> | <i>IV-1</i> |
| <i>B. UPAYA PEMECAHAN MASALAH</i> | <i>IV-1</i> |

BAB V PENUTUP

- | | |
|--------------------------|------------|
| <i>A. KESIMPULAN</i> | <i>V-1</i> |
| <i>B. REKOMENDASI</i> | <i>V-1</i> |

DAFTAR TABEL

		<i>Halaman</i>
Tabel II.1	Kesesuaian Renja Perubahan Tahun 2022 terhadap Perubahan Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Tahun 2019-2024	II.1
Tabel III.1	Kesesuaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara Renja Perubahan Badan Kesbangpol Tahun 2022 dengan APBD Provinsi Lampung Tahun 2022	III.1
Tabel III.2	Capaian Kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Tahun 2022	III.4
Tabel III.3	Pencapaian Sasaran 1	III.5
Tabel III.4	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan mendukung Menurunnya Potensi Konflik Menjadi Peristiwa Konflik di Provinsi Lampung Tahun 2022	III.6
Tabel III.5	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator yang Menunjang Keberhasilan Kinerja Sasaran 1	III.10
Tabel III.6	Pencapaian Sasaran 2	III.12
Tabel III.7	Prosentase Partisipasi Masyarakat yang Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu dan Pilkada Tahun 2020	III.13
Tabel III.8	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan mendukung Peningkatan Partisipasi Masyarakat yang Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu dan Pilkada Tahun 2022	III.4
Tabel III.9	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator yang Menunjang Keberhasilan Kinerja Sasaran 2	III.15
Tabel III.10	Realisasi Anggaran Tahun 2022	III.16
Tabel III.11	Pagu dan Realisasi Anggaran Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Tahun 2022	III.16
Tabel III.12	Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Tahun 2022	Tabel III.12

Tabel III.13	Realisasi Capaian Kinerja dan Keuangan s.d. TriwulanIV (empat) TA. 2022	III.18
Tabel V.1	Realisasi Anggaran Triwulan IV Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung	V.1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Undang-undang ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam perencanaan pembangunan, pemerintah daerah harus mampu menjamin bahwa kegiatan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran, sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Secara nasional, pemerintah merupakan induk dalam proses pembangunan yang harus membuat pedoman Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) periode 20 tahun, sebagai capaian pembangunan yang disepakati oleh legislatif dan eksekutif serta seluruh *stakeholder* yang terlibat pada skala nasional.

Selanjutnya, RPJP tersebut diuraikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 5

tahun yang menjadi pedoman pemerintah daerah untuk mendukung RPJMN tersebut dalam wadah RPJP dan RPJMD Provinsi, Kabupaten dan Kota sampai pada perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk mengaplikasikan visi dan misi rencana pembangunan daerah.

Penjabaran RPJMD dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Program antara RPJMD dengan RKPD harus konsisten, sehingga dapat tercapai sasaran dan prioritas pembangunan daerah. Untuk memastikan konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan dan Tolak ukur Capaian Indikator Sasaran Pemerintah Daerah, maka sesuai dengan Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disusun Evaluasi Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Triwulan IV Tahun 2022.

B. DASAR HUKUM

Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Triwulan IV Tahun 2022 merupakan implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Evaluasi Rencana Kerja Triwulan IV Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Tahun 2022 adalah sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Badan Kesbangpol Provinsi Lampung periode triwulan IV Tahun Anggaran 2022 dan tolok ukur pencapaian target Sasaran Pembangunan Badan Kesbangpol Provinsi Lampung periode triwulan IV Tahun 2022.

Tujuan penyusunan Evaluasi Rencana Kerja Badan Kesbangpol Provinsi Lampung periode Januari s.d Desember 2022 (triwulan IV) tahun 2022 antara lain:

1. Menjalankan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2022;
2. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas target kerja yang telah dibuat dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2019-

2024 dan telah dijabarkan dalam Perubahan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Tahun 2022;

3. Sebagai upaya monitoring dan evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan periode bulan Januari s.d Desember (triwulan IV) tahun 2022 guna menganalisa pencapaian target kinerja dan keuangan.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Evaluasi Rencana Kerja Badan Kesbangpol Provinsi Lampung meliputi sasaran strategis, dan indikator target kinerja tahun 2022 sebagaimana tercantum dan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2019-2024.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika penyusunan evaluasi renja triwulan IV tahun 2022

BAB II. PERSANDINGAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RENJA DENGAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

BAB III. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang kesesuaian program/kegiatan/sub kegiatan antara Renja perangkat daerah dengan APBD Tahun 2022, realisasi capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran rencana kerja perangkat daerah dan capaian kinerja sasaran perubahan renstra perangkat daerah triwulan IV tahun 2022/IKU perangkat daerah

BAB IV. HAMBATAN DAN KENDALA

Menguraikan Hambatan dan Kendala yang dihadapi pada pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan kurun waktu Januari s.d Desember (triwulan IV) Tahun 2022 serta upaya pemecahan masalah

BAB V. PENUTUP

Menguraikan kesimpulan dan rekomendasi atas pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Triwulan IV Tahun 2022.

BAB II

PERSANDINGAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RENJA PERUBAHAN TAHUN 2022 DENGAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Kesesuaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Pagu Pendanaan, Indikator dan Target Kinerja Antara Dokumen Renja Tahun 2022 dengan Renstra OPD Tahun 2019–2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dijabarkan sebagai berikut:

Tabel II. 1
Kesesuaian Renja Perubahan Tahun 2022 terhadap Perubahan Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	PAGU RENSTRA PERUBAHAN		PAGU RENJA PERUBAHAN	
			2022		2022	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				19.088.101.826		20.481.768.777 ,15
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				19.088.101.826		20.481.768.777 ,15
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	persen	75	15.611.576.426	75	16.298.283.377 ,15
KEGIATAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keselarasan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	persen	92,5	183.918.500	92,5	143.918.500
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	dokumen	5	101.184.000	5	23.396.700
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD tepat waktu	dokumen	4	22.182.300	4	22.182.300
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	dokumen	4	20.000.000	4	25.211.800
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	dokumen	4	20.000.000	4	24.678.500
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	12		12	27.897.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	laporan	14	20.552.200	14	20.552.200

KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Prosentase layanan administrasi keuangan	persen	90	13.500.332.886	90	14.178.439.837,15
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan	orang/bulan	51	6.375.742.886	51	6.408.849.837,15
Pelaksanaan Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah badan/lembaga penerima hibah uang	dokumen	39	7.080.000.000	39	7.705.000.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen akuntansi	dokumen	12	22.414.000	12	24.914.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	laporan				15.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen keuangan	laporan	18	22.176.000	18	24.676.000
KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keselarasan laporan dan pengelola aset	persen	92	23.368.000	92	23.368.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	laporan	4	11.684.000	12	11.684.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen barang dan pengelolaan aset milik daerah	laporan	8	11.684.000	8	11.684.000
KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Prosentase layanan administrasi kepegawaian	persen	80	19.910.000	80	19.910.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi	orang/hari/kegiatan	181	19.910.000	181	19.910.000
KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Prosentase layanan administrasi umum	persen	80	1.251.078.200	80	1.287.552.700
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	paket	12	14.574.200	12	14.574.200
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	36	345.505.000	36	343.076.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tanggayang disediakan	paket	12	8.000.000	12	8.000.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	laporan	12	33.450.000	12	33.450.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	paket	12	25.000.000	12	27.529.500

Penyediaan Bahan/Material	Jumlah penyediaan bahan/material	paket	12	100.780.000	12	100.780.000
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	60	723.769.000	60	760.143.000
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Prosentase layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	75	399.408.840	75	403.414.340
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	12	200.408.840	12	200.408.840
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	12	199.000.000	12	203.005.500
KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Prosentase layanan pemeliharaan barang milik daerah	persen	62,5	233.560.000	62,5	241.680.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	7	185.170.000	7	185.170.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	unit	8	32.210.000	238	32.210.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	unit	100	16.180.000	28	24.300.000
2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat	persen	25	993.347.800	25	1.019.837.800
KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN DI BIDANG IDEOLOGI DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase pelaksanaan pemantapan ideologi dan karakter kebangsaan	persen	25	993.347.800	25	1.019.837.800
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	dokumen	12	26.347.500	3	26.347.500
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	dokumen	24	96.373.000	3	96.373.000

	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	orang	2740	867.167.500	1580	867.167.500
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	laporan	15	3.459.800	1	29.949.800
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prosentase lembaga dan ormas aktif dalam ketahanan sosial dan kemasyarakatan di Provinsi Lampung	persen	25	158.433.000	25	188.433.000
	KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prosentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	persen	25	158.433.000	25	188.433.000
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	orang	495	136.833.000	400	136.833.000
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	laporan	15	21.600.000	1	51.600.000
4.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Prosentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	persen	25	614.593.000	25	1.214.593.000
	KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	Prosentase Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	persen	25	614.593.000	25	1.214.593.000

	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	orang	1370	592.993.000	1370	592.993.000
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	orang				497.200.000
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	laporan	15	21.600.000	1	124.400.000
5.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prosentase koordinasi dan peran lembaga dan elemen masyarakat dalam pencegahan terjadinya konflik sosial di Provinsi Lampung	persen	25	1.217.332.600	85	1.243.822.600
	KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prosentase koordinasi, pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	persen	25	1.217.332.600	85	1.243.822.600
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	dokumen	2	100.000.000	2	100.000.000
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja	orang	950	395.827.400	950	395.827.400

	Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah					
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	orang	1200	391.225.600	600	391.225.600
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Lapaoran Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	laporan	15	4.133.600	1	30.623.600
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	dokumen	4	326.146.000	4	326.146.000
6.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Prosentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di provinsi lampung	persen	25	492.819.000	72,55	516.799.000
	KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK ETIKA BUDAYA POLITIK PENINGKATAN DEMOKRASI FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK	Prosentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	persen	25	492.819.000	25	516.799.000
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta	dokumen	6	7.823.800	1	7.823.800

Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pemantauan Situasi Politik di Daerah					
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	dokumen	12	12.617.000	1	12.617.000
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	orang	450	182.778.700	450	182.778.700
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	orang	1230	283.399.500	800	283.399.500
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	laporan	15	6.200.000	1	30.180.000

BAB III

CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

A. KESESUAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN ANTARA RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 DENGAN APBD TAHUN 2022

Sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renja Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Tahun 2022 disusun berpedoman pada Perubahan Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dan harus selaras dengan Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, berpedoman pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah mengalami perubahan dari Program dan Kegiatan menjadi Program, Kegiatan dan Sub Bagian. Kesesuaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara Rencana Kerja Badan Kesbangpol dengan APBD Provinsi Lampung Tahun 2022 digambarkan sesuai tabel berikut:

Tabel III.1
Kesesuaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara Renja Perubahan Badan Kesbangpol Tahun 2022 dengan APBD Provinsi Lampung Tahun 2022

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RKPD	APBD	KET
1	2	3	4	5
8:01	Urusan Pemerintahan Umum			
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	√	√	Sesuai
8.01.01.1.01	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	√	√	Sesuai
8.01.01.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	√	√	Sesuai
8.01.01.1.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	√	√	Sesuai
8.01.01.1.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	√	√	Sesuai
8.01.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	√	√	Sesuai
8.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	√	√	Sesuai
8.01.01.1.02.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	√	√	Sesuai
8.01.01.1.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	√	√	Sesuai
8.01.01.1.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	√	√	Sesuai

8.01.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	√	√	Sesuai
8.01.01.1.03.06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	√	√	Sesuai
8.01.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	√	√	Sesuai
8.01.01.1.05.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	√	√	Sesuai
8.01.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	√	√	Sesuai
8.01.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	√	√	Sesuai
8.01.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	√	√	Sesuai
8.01.01.1.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	√	√	Sesuai
8.01.01.1.06.04	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	√	√	Sesuai
8.01.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	√	√	Sesuai
8.01.01.1.06.07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	√	√	Sesuai
8.01.01.1.06.09	Sub Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	√	√	Sesuai
8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	√	√	Sesuai
8.01.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	√	√	Sesuai
8.01.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	√	√	Sesuai
8.01.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	√	√	Sesuai
8.01.01.1.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	√	√	Sesuai
8.01.01.1.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	√	√	Sesuai
8.01.01.1.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	√	√	Sesuai
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	√	√	Sesuai
8.01.02.1.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pementapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	√	√	Sesuai
8.01.02.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	√	√	Sesuai
8.01.02.1.01.02	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	√	√	Sesuai
8.01.02.1.01.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	√	√	Sesuai
8.01.02.1.01.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	√	√	Sesuai
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	√	√	Sesuai

8.01.03.1.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	√	√	Sesuai
8.01.03.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	√	√	Sesuai
8.01.03.1.01.02	Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	√	√	Sesuai
8.01.03.1.01.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	√	√	Sesuai
8.01.03.1.01.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	√	√	Sesuai
8.01.03.1.01.05	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	√	√	Sesuai
8.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	√	√	Sesuai
8.01.04.1.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	√	√	Sesuai
8.01.04.1.01.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	√	√	Sesuai
8.01.04.1.01.05	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	√	√	Sesuai
8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	√	√	Sesuai
8.01.05.1.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	√	√	Sesuai
8.01.05.1.01.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	√	√	Sesuai
8.01.05.1.01.05	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	√	√	Sesuai
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	√	√	Sesuai

8.01.06.1.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	√	√	Sesuai
8.01.06.1.01.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	√	√	Sesuai
8.01.06.1.01.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	√	√	Sesuai
8.01.06.1.01.05	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	√	√	Sesuai

B. REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN RENJA PERUBAHAN SKPD TRIWULAN IV TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Lampung, target capaian kinerja masing-masing indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung tahun 2022 disajikan pada tabel III.2 yang memberikan informasi mengenai sasaran strategis, indikator kinerja, target, realisasi dan capaian/realisasi yang telah dicapai selama tahun 2022.

Tabel III.2
Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Lampung Tahun 2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Sat	TAHUN 2022		CAPAIAN
				Target	Realisasi	
1	Menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung.	Prosentase Menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung.	%	80	100	125,00
2	Peningkatan kehidupan demokrasi yang menghormati kearifan lokal dan etika politik.	Prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih.	Angka	72,25	74,09	102,54

Sumber: Olahan data Badan Kesbangpol Prov. Lampung, Januari 2023

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung memiliki 2 (dua) buah indikator kinerja yang digunakan untuk mencapai sasaran

strategis yang telah ditetapkan. Secara umum, berdasarkan hasil review indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung tahun 2022, dari 2 (dua) buah indikator tersebut di atas kinerjanya melampaui target yang ditetapkan.

Evaluasi kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja, kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan dengan membandingkan prosentase capaian Indikator Kinerja Utama pada tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya, serta perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel III.3
Pencapaian Sasaran 1

Sasaran 1								
Sasaran 1	Menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung.							
IKU _(1/2)	Prosentase Menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung.							
Satuan	%							
2021			2022			2024		Nasional 2022
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian	Realisasi
80	100	125,00	80	100	125,00	90,00	111	82,73

Sumber: Olahan data Badan Kesbangpol Prov. Lampung, Januari 2023

Secara umum, konflik dalam kehidupan sosial merupakan fenomena sosial yang menyangkut perselisihan antar pihak baik dalam skala individu maupun kelompok. Dengan demikian potensi konflik sosial akan selalu ada di tengah masyarakat. Sasaran menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung memiliki 1 indikator. Indikator kinerja pertama adalah Prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung dengan realisasi sebesar 100% dari target sebesar 80% yang direncanakan dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 125,00% dengan kategori kinerja Sangat Tinggi dan telah mencapai target yang diperjanjikan. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 (125,00%) maka

kinerja tetap dan apabila dibandingkan dengan target akhir tahun 2024 maka capaian kinerja mencapai 111%. Posisi indikator ini lebih tinggi 17,27% dari rata-rata nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta sebesar 82,73%.

Berdasarkan hasil pemetaan potensi konflik di Provinsi Lampung yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung, pada tahun 2022 terdapat 70 potensi konflik yang terpetakan di 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang terdiri dari potensi konflik Ekopolsosbud sebanyak 9 kasus, Sumberdaya Alam/Lahan sebanyak 55 kasus, dan SARA sebanyak 6 kasus. Sampai dengan akhir tahun 2022, dari 70 potensi konflik yang terdata tidak ada satupun yang menjadi peristiwa konflik. Situasi kondusif yang tercipta di Wilayah Provinsi Lampung merupakan upaya bersama yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi dan Kab/Kota Se-Provinsi Lampung dengan melibatkan peran serta masyarakat didalamnya.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Lampung Tahun 2022 dalam rangka mencegah terjadinya potensi konflik menjadi peristiwa konflik di Provinsi Lampung sebagai tabel berikut:

Tabel III.4
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan mendukung Menurunnya Potensi Konflik Menjadi Peristiwa Konflik di Provinsi Lampung Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
I	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	25	24,60	98,40
1	Rapat Program Kerja FPK	orang	40	40	100
2	Rapat Program Kerja GNRM	orang	40	40	100
3	Kegiatan Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila di Provinsi Lampung	orang	100	100	100
4	Sosialisasi Pencegahan Radikalisme dan Ekstrimisme di Provinsi Lampung	orang	100	100	100
5	Kegiatan Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila di Provinsi Lampung	orang	100	100	100
6	Sosialisasi Bela Negara bagi Generasi Muda di Provinsi Lampung	orang	100	90	90
7	Sosialisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental di Provinsi Lampung	orang	100	69	69
8	Sosialisasi Pencegahan Ekstremisme di Provinsi Lampung	orang	100	58	58
9	Sosialisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental di Provinsi Lampung	orang	100	86	86

10	Sosialisasi Bela Negara bagi Generasi Muda di Provinsi Lampung	orang	100	90	90
11	Sosialisasi Pencegahan Ektremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme bagi Generasi Muda di Provinsi Lampung	orang	100	99	99
12	Sosialisasi Pencegahan Ektremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme bagi Generasi Muda di Provinsi Lampung	orang	110	100	90,90
13	Sosialisasi Pencegahan Ektremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme bagi Generasi Muda di Provinsi Lampung	orang	100	125	125
14	Rapat Program Kerja GNRM	orang	50	50	100
15	Rapat Program Kerja FPK	orang	50	50	100
16	Rapat Kerja PPWK	orang	50	50	100
17	Lokakarya Pendidikan Kewarganegaraan (Kegiatan Silaturahmi Kebangsaan bagi Organisasi Masyarakat)	orang	154	185	120.12
18	Lokakarya Pendidikan Kewarganegaraan (Memperkokoh Peran Keluarga Dalam Menangkal Paham Radikalisme)	orang	120	168	140
19	Rapat Kerja FPK	orang	50	50	100
20	Rapat Kerja PPWK	orang	50	50	100
21	Rapat Kerja GNRM	orang	50	50	100
22	Upacara Bela Negara	orang	450	450	450
II	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	%	25	25	100
1	Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Cinta Tanah Air bagi Ormas di Kab. Tanggamus	orang	100	99	99
2	Dialog Interaktif Dengan Organisasi Masyarakat di Provinsi Lampung	orang	35	35	100
3	Pembinaan Organisasi Masyarakat di Kab. Tulang Bawang	orang	100	100	100
III	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	25	25	100
1	Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan gan Peredaran Gelap Narkotika	orang	150	150	100
3	Pembinaan Pondok Pesantren di Kabupaten Pesawaran	orang	150	150	100
4	Rapat Koordinasi Tim Terpadu P4GN di Provinsi Lampung	orang	50	50	100
5	Pembinaan Pondok Pesantren dalam Mencegah Ekstrimisme	orang	100	100	100
6	Pembinaan Pondok Pesantren	orang	85	85	100
7	Sosialisasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika di Kab. Tanggamus	orang	150	150	100
9	Pembinaan Pondok Pesantren Di Kabupaten Tanggamus	orang	150	150	100
10	Sosialisasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	orang	35	35	100
12	Sosialisasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika di Kab. Tulang Bawang	orang	150	150	100
14	Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung	orang	100	100	100
15	Sosialisasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika	orang	150	150	100

16	Pembinaan Pondok Pesantren	orang	85	85	100
17	Rapat Koordinasi Tim Terpadu P4GN di Provinsi Lampung	orang	50	50	100
18	Rapat Koordinasi Tim Terpadu P4GN di Provinsi Lampung	orang	50	50	100
19	Pembinaan Pondok Pesantren Dalam Mencegah Ekstrimisme	orang	100	100	100
20	Sosialisasi IPWK dalam Mencegah Radikalisme di Pondok Pesantren	orang	100	100	100
21	Sosialisasi IPWK dalam Mencegah Radikalisme di Pondok Pesantren	orang	100	100	100
22	Sosialisasi IPWK dalam Mencegah Radikalisme di Pondok Pesantren	orang	100	100	100
23	Sosialisasi IPWK dalam Mencegah Radikalisme di Pondok Pesantren	orang	100	100	100
24	Sosialisasi IPWK dalam Mencegah Radikalisme di Pondok Pesantren	orang	100	100	100
25	Sosialisasi IPWK dalam Mencegah Radikalisme di Pondok Pesantren	orang	100	100	100
26	Sosialisasi IPWK dalam Mencegah Radikalisme di Pondok Pesantren	orang	100	100	100
27	Sosialisasi IPWK dalam Mencegah Radikalisme di Pondok Pesantren	orang	100	100	100
IV	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	%	25	21,95	87,83
1	Bimbingan Teknis Pencegahan Penanggulangan Ekstremisme Terorisme dan Radikalisme Bagi Mahasiswa	orang	150	150	100
2	Pembinaan Kewaspadaan Nasional Terhadap Potensi Ancaman Tantangan Hambatan Dan Gangguan (ATHG) Bagi Pemuda, Pelajar Dan Mahasiswa	orang	70	70	100
3	Rapat Koordinasi Stabilitas Dan Kewaspadaan Dini Daerah	orang	50	20	40
4	Pembinaan Kewaspadaan Nasional Terhadap Potensi Ancaman Tantangan Hambatan Dan Gangguan (ATHG) Bagi Organisasi Masyarakat Dan Tokoh Agama	orang	70	70	100
5	Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung	orang	45	28	62,22
6	Bimbingan Teknis Pencegahan Penanggulangan Ekstremisme Terorisme dan Radikalisme bagi Mahasiswa	orang	150	150	100
7	Rapat Koordinasi Stabilitas dan Kewaspadaan Dini Daerah	orang	50	21	42
8	Pembinaan Kewaspadaan Nasional Terhadap Potensi Ancaman Tantangan Hambatan Dan Gangguan (ATHG) Bagi Pemuda, Pelajar Dan Mahasiswa	orang	70	70	100
9	Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Periode B 08 Provinsi Lampung	orang	50	50	100
10	Pembinaan Kewaspadaan Nasional Terhadap Potensi Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan (ATHG) bagi Organisasi Masyarakat dan Tokoh Agama	orang	70	70	100
11	Pembinaan Kewaspadaan Nasional Terhadap Potensi Ancaman Tantangan Hambatan Dan Gangguan (ATHG) Bagi Pemuda, Pelajar Dan Mahasiswa	orang	70	70	100
12	Rapat Koordinasi Forkopimda Provinsi Lampung	orang	50	46	92
13	Pembinaan Kewaspadaan Nasional Terhadap Potensi Ancaman Tantangan Hambatan Dan Gangguan (ATHG)	orang	70	70	100

14	Pembinaan Kewaspadaan Nasional Terhadap Potensi Ancaman Tantangan Hambatan Dan Gangguan (ATHG)	orang	70	70	100
15	Pembinaan Kewaspadaan Nasional Terhadap Potensi Ancaman Tantangan Hambatan Dan Gangguan (ATHG)	orang	70	70	100
16	Rapat Koordinasi Forkopimda Provinsi Lampung	orang	50	43	86
17	Bimbingan Teknis Pencegahan Penanggulangan Ekstremisme Terorisme Dan Radikalisme Bagi Mahasiswa	orang	150	150	100
18	Bimbingan Teknis Pencegahan Penanggulangan Ekstremisme Terorisme Dan Radikalisme Bagi Mahasiswa	orang	150	150	100
19	Rapat Koordinasi Forkopimda Provinsi Lampung	orang	50	26	52
20	Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Periode B 08 Provinsi Lampung	orang	30	27	90
21	Pembinaan Kewaspadaan Nasional Terhadap Potensi Ancaman Tantangan Hambatan Dan Gangguan (ATHG)	orang	70	70	100
22	Pembinaan Kewaspadaan Nasional Terhadap Potensi Ancaman Tantangan Hambatan Dan Gangguan (ATHG)	orang	70	70	100
23	Rapat Koordinasi Forkopimda Provinsi Lampung	orang	50	28	56

Sumber: Olahan data Badan Kesbangpol Prov. Lampung, Januari 2023

Capaian indikator Prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung didukung oleh 4 (empat) program dengan capaian kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dari target sebesar 25% terealisasi sebesar 24,60% sehingga capaian kinerja program sebesar 98,40%;
- Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dari target sebesar 25% terealisasi sebesar 25%, sehingga capaian kinerja program sebesar 100%;
- Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dari target sebesar 25% terealisasi sebesar 25%, sehingga capaian kinerja program sebesar 100%; dan
- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial dari target sebesar 25% terealisasi sebesar 21,95%, sehingga capaian kinerja program sebesar 87,83%.

Program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung pada sasaran strategis 1 menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung didukung oleh 4 (empat) program, 4 (empat) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan, adapun program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator sebagai berikut:

Tabel III.5
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator yang Menunjang Keberhasilan Kinerja Sasaran 1

NAMA PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
1	2	3	4
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN DI BIDANG IDEOLOGI DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	• Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila • Sosialisasi Pencegahan Radikalisme dan Ekstrimisme • Sosialisasi Bela Negara bagi Generasi Muda • Sosialisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental • Lokakarya Pendidikan Kewarganegaraan • Upacara Hari Bela Negara
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	• Dialog interaktif dengan Organisasi Kemasyarakatan • Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan • Pemantapan Nilai Kebangsaan dan Cinta Tanah Air bagi Ormas
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	• Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika • Pembinaan Pondok Pesantren • Sosialisasi Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam mencegah Radikalisme
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	• Bimbingan Teknis Pencegahan Penanggulangan Ekstrimisme, Terorisme dan Radkalisme • Pembinaan Kewaspadaan Nasional terhadap ATHG

Beberapa faktor pendukung dalam pencapaian indikator kinerja tersebut diantaranya:

1. Meningkatnya peran tim dan forum-forum strategis yang difasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam mendeteksi dan mengantisipasi setiap permasalahan atau gangguan yang mungkin timbul di tengah masyarakat karena forum ini merupakan wadah informasi, komunikasi, konsultasi dari berbagai unsur terkait dalam rangka mewujudkan sinergitas dan harmonisasi dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang terjadi dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.
2. Meningkatnya sinergi antar lembaga dan pihak terkait dalam mengantisipasi permasalahan yang berkembang khususnya yang berkaitan dengan konflik.
3. Tersedianya buku pemetaan dan penanganan daerah rawan konflik yang disusun sebagai salah satu upaya meminimalisir meluasnya konflik yang dipicu oleh berbagai macam faktor, serta dapat menjadi pedoman pengelolaan potensi konflik di tahun mendatang.

Meskipun capaian sasaran 1 sudah optimal, namun masih ditemukan kendala, sebagai berikut:

1. Pluralitas masyarakat Provinsi Lampung, sehingga dapat menjadi potensi konflik jika tidak disikapi dengan bijak dan benar.
2. Masih adanya ancaman peredaran gelap serta penyalahgunaan narkoba di Provinsi Lampung di tengah-tengah masyarakat.
3. Masih ada organisasi atau kelompok masyarakat yang mempertentangkan ideologi Pancasila sebagai dasar Negara dan ingin menggantinya dengan ideologi lain.
4. Tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung masih belum sepenuhnya merata sehingga kesenjangan ekonomi tersebut memungkinkan mendorong timbulnya potensi konflik sosial ekonomi.

Solusi yang dilakukan terkait permasalahan tersebut, sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan yang melibatkan tokoh agama, tokoh adat untuk meningkatkan toleransi, rasa saling menghargai dan

- menghormati dalam kehidupan bermasyarakat demi keutuhan dan kerukunan bangsa.
2. Meningkatkan upaya cegah dini potensi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dengan berbagai metode untuk seluruh lapisan masyarakat.
 3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan dengan ormas untuk menanamkan nilai-nilai ideologi Pancasila dan rasa nasionalisme.
 4. Memperkuat koordinasi pencegahan dan penanganan konflik berlatar belakang ketahanan ekonomi.

Tabel III.6
Pencapaian Sasaran 2

Sasaran 2								
Sasaran 2	Peningkatan kehidupan demokrasi yang menghormati kearifan lokal dan etika politik.							
IKU _(2/2)	Prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih.							
Satuan	Angka							
2021			2022			2024		Nasional 2020
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian	Realisasi
72,25	74,09	102,54	72,25	74,09	102,54	73,00	101,49	76,09

Sumber: Olahan data Badan Kesbangpol Prov. Lampung, Januari 2023

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang memungkinkan setiap warga Negara memiliki kebebasan politik yang setara. Sasaran peningkatan kehidupan demokrasi yang menghormati kearifan lokal dan etika politik memiliki 1 indikator, yaitu Prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih dengan realisasi sebesar 74,09% dari target sebesar 72,25% yang direncanakan dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 102,54% dengan kategori kinerja Sangat Tinggi dan telah mencapai target yang diperjanjikan. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 (102,54%) maka kinerja tetap dan apabila dibandingkan dengan target akhir tahun 2024 maka capaian kinerja mencapai 101,49%. Posisi indikator ini lebih rendah 2% dari rata-rata nasional partisipasi pemilih pemilukada 2020 yang berlangsung di 270 daerah (9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota) sebesar 76,09%.

Capaian indikator kinerja ini didukung oleh 1 (satu) program, yaitu Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan capaian kinerja program sebesar 100%, sedang data prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih dalam pemilu dan pilkada sebesar 74,09% masih menggunakan data hasil pemilukada 8 (delapan) kabupaten/Kota serentak se-Provinsi Lampung tahun 2020. Prosentase ini diperoleh dari perhitungan prosentase rata-rata partisipasi pemilih di 8 (delapan) kabupaten/kota. Adapun total jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan jumlah daftar pemilih tetap tercantum dalam tabel berikut:

Tabel III.7
Prosentase Partisipasi Masyarakat yang Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu dan Pilkada Tahun 2020

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilih	Jumlah DPT	Prosentase
1	Lampung Selatan	457.537	704.367	64,96%
2	Lampung Tengah	654.189	922.398	70,92%
3	Lampung Timur	528.942	770.477	68,65%
4	Pesisir Barat	90.097	107.150	84,08%
5	Way Kanan	241.609	323.068	74,79%
6	Pesawaran	239.366	318.793	75,09%
7	Bandar Lampung	447.445	649.790	68,86%
8	Metro	98.857	115.844	85,34%
Rata-rata partisipasi				74,09%

Sumber: Olahan data Badan Kesbangpol Prov. Lampung, Januari 2023

Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung yang menunjang partisipasi penduduk dalam pemilu dan pilkada tercantum dalam tabel berikut:

Tabel III.8

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan mendukung Peningkatan Partisipasi Masyarakat yang Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu dan Pilkada Tahun 2022

No.	Nama Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
V	Program Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	%	25	25	100
1	Rapat Kelompok Kerja (POKJA) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Lampung	orang	30	30	100
2	Sosialisasi Pemilu 2024 Terhadap Pemilih Pemula di Kab. Pesisir Barat	orang	100	100	100
3	Focus Grup Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Lampung	orang	80	80	100
4	Bimbingan Teknologi Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022	orang	120	120	100
5	Rapat Pembinaan Kepada Partai Politik di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022	orang	80	80	100
6	Rapat Koordinasi Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022	orang	80	80	100

Sumber: Olahan data Badan Kesbangpol Prov. Lampung, Januari 2023

Capaian kinerja prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih didukung oleh program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan dan pengembangan etika serta budaya politik, pada tahun 2022 dari target kinerja sebesar 25% terealisasi sebesar 25%, sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

Pada tahun 2022 kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam peningkatan peran serta masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024 berupa sosialisasi bagi pemilih pemula, pembinaan orpol dan ormas dan pembentukan Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

Program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung pada sasaran strategis 2 peningkatan kehidupan demokrasi yang menghormati kearifan lokal dan etika politik didukung oleh 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, adapun program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator sebagai berikut:

Tabel III.9

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator yang Menunjang Keberhasilan Kinerja Sasaran 2

NAMA PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
1	2	3	4
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK ETIKA BUDAYA POLITIK PENINGKATAN DEMOKRASI FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK PEMILIHAN UMUM/ PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	• Sosialisasi Pemilu 2024 terhadap Pemilih Pemula • Focus Group Discussion (FGd) Indeks Demikrasi Indonesia (IDI) Provinsi Lampung

Sumber: Olahan data Badan Kesbangpol Prov. Lampung, Januari 2023

Salah satu faktor pendukung dalam pencapaian indikator kinerja tersebut adalah terlaksananya pendidikan politik secara berkesinambungan bagi masyarakat khususnya pemilih pemula sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajibannya dalam Pemilu serta sebagai upaya menciptakan etika dan budaya politik yang demokratis.

Meskipun capaian indikator kinerja sasaran 2 telah optimal, namun masih ditemukan kendala dalam proses pelaksanaan kegiatan, sebagai berikut:

1. Minimnya anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan sehingga jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan politik masih sangat terbatas.
2. Tingkat pendidikan masyarakat di Provinsi Lampung yang mayoritas masih rendah yang berpengaruh terhadap tingkat budaya politik dan partisipasi politik masyarakat.

Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada *outcome* sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai.
2. Meningkatkan upaya edukasi berkelanjutan terkait wawasan hak-hak politik dan kebebasan politik untuk mendukung kenaikan partisipasi politik masyarakat.

C. REALISASI ANGGARAN

Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung mengelola anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung dengan total nilai keseluruhan adalah sebagai berikut:

Tabel III.10
Realisasi Anggaran Tahun 2022

No	URAIAN	PAGU DANA Rp.	REALISASI Rp.	SALDO Rp.	CAPAIAN KINERJA %
1	2	3	4	5	7
I	BELANJA	20.481.768.777,15	18.318.694.913,00	2.163.073.864,15	89,43
I	BELANJA OPERASI	20.138.692.777,15	17.976.619.913,00	2.162.072.864,15	89,26
	Belanja Pegawai	6.525.849.837,15	6.179.271.735,00	346.578.102,15	94,68
	Belanja Barang dan Jasa	5.907.842.940,00	5.027.978.578,00	879.864.362,00	85,10
	Belanja Hibah	7.705.000.000,00	6.769.369.600,00	935.630.400,00	87,85
II	BELANJA MODAL	343.076.000,00	342.075.000,00	1.001.000,00	99,70
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	343.076.000,00	342.075.000,00	1.001.000,00	99,70

Sumber: Olahan data Badan Kesbangpol Prov. Lampung, Januari 2023

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi RPJMD Provinsi Lampung pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.11
Pagu dan Realisasi Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2022

No	Misi 1	Indikator Kinerja		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama, dan Keamanan Daerah.	1	Prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung.	2.384.046.500,00	2.289.192.800,00	96,02
		2	Prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih.	289.399.500,00	246.463.400,00	86,96
				2.673.446.000,00	2.535.656.200,00	94,84

Sumber: Olahan data Badan Kesbangpol Prov. Lampung, Januari 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung pada tahun 2022.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung, dapat diketahui dari capaian kinerja dan anggaran yang digunakan pada tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.12
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Lampung Tahun 2022

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja %	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
A.	Misi 1,			2.535.656.200,00	94,84
1	Memuaskan		113,77		
2	Sangat Baik				
3	Baik	2			
4	Cukup Baik				
5	Agak Kurang				
6	Kurang				

Sumber: Olahan data Badan Kesbangpol Prov. Lampung, Januari 2023

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja organisasi.

D. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Hasil evaluasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial **tahun 2022** Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung memperoleh ***“Peringkat 3 (tiga) Penanganan Konflik Sosial Tingkat Nasional.***

Tabel III.13
Realisasi Capaian Kinerja dan Keuangan s.d Triwulan IV (empat) TA. 2022

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan (Outcome)	Target RENSTRA Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Provinsi sampai dengan tahun 2021		Target Kinerja dari Anggaran Renja Provinsi Tahun 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022								Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
									I		II		III		IV									
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	%	75	15,611,576,426.00	75	13,154,018,253.00	75	16,298,283,377.15	10	980,027,732.00	15	7,567,748,198.00	25	3,411,372,313.00	25	2,669,623,870.00	100.00	89.76	75	14,628,772,113.00	100	93.70		
	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	97.5	183,918,500.00	90	132,692,000.00	92.5	143,918,500.00	12.5	11,372,200.00	25	11,172,200.00	25	12,372,500.00	30	90,057,700.00	100.00	86.84	92.5	124,974,600.00	100	67.95		
08.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	5	101,184,000.00	5	91,684,000.00	5	23,396,700.00	3	3,317,000.00	0	1,906,200.00	1	3,680,500.00	1	14,493,000.00	100.00	100.00	5	23,396,700.00	100	23.12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
08.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	4	22,182,300.00	4	24,849,500.00	4	22,182,300.00	2	5,135,300.00	0	3,925,800.00	1	1,379,000.00	1	10,742,200.00	100.00	95.49	4	21,182,300.00	100	95.49	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.1.01.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	dokumen	14	20,000,000.00	14	0.00	4	25,211,800.00	0	0.00	0	0.00		0.00	4	17,811,800.00	100.00	70.65	4	17,811,800.00	28.57	89.06	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	
8.01.1.01.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	dokumen	4	20,000,000.00	4	0	4	24,678,500.00	0	0.00	0	0.00		0.00	4	19,618,500.00	100.00	79.50	4	19,618,500.00	100	98.09	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.1.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	0	0.00	0	0	12	27,897,000.00	0	0.00	0	0.00		0.00	12	22,874,000.00	100.00	81.99	12	22,874,000.00	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	
08.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	14	20,552,200.00	14	16,158,500.00	14	20,552,200.00	10	2,919,900.00	1	5,340,200.00	1	7,313,000.00	2	4,518,200.00	100.00	97.76	14	20,091,300.00	100	97.76	Badan Kesatuan	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	95	13,500,332,886.00	80	11,539,219,779.00	90	14,178,439,837.15	15	800,138,069.00	25	7,167,750,207.00	25	2,947,008,365.00	25	1,976,547,994.00	100.00	90.92	90	12,891,444,635.00	100	95.49		
08.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	51	6,375,742,886.00	51	5,849,553,221.00	51	6,408,849,837.15	51	793,430,469.00	0	2,068,584,207.00	0	1,693,435,365.00	0	1,506,821,694.00	100.00	94.59	51	6,062,271,735.00	100	95.08	Badan Kesatuan	
08.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	39	7,080,000,000.00	39	5,651,190,558.00	39	7,705,000,000.00	39	0.00	0	5,091,669,600.00	0	1,247,700,000.00	0	430,000,000.00	100.00	87.86	39	6,769,369,600.00	100	95.61	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

08.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dokumen	12	22,414,000.00	12	20,596,000.00	12	24,914,000.00	3	2,082,600.00	3	5,376,400.00	3	2,748,000.00	3	13,188,300.00	100.00	93.90	12	23,395,300.00	100	104.38	Badan Kesatuan Bangsa dan	
8.01.1.01.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	dokumen	0	0.00	0	0.00	12	15,000,000.00	3	0.00	3	0.00	3	0.00	3	13,948,400.00	100.00	92.99	12	13,948,400.00	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	
08.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	laporan	18	22,176,000.00	18	17,880,000.00	18	24,676,000.00	4	4,625,000.00	4	2,120,000.00	4	3,125,000.00	6	12,589,600.00	100.00	91.02	18	22,459,600.00	100	101.28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	96	23,368,000.00	90	11,684,000.00	92	23,368,000.00	15	4,628,800.00	20	2,127,800.00	25	4,488,800.00	32	8,849,600.00	100.00	85.99	92	20,095,000.00	100	85.99		
08.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	laporan	4	11,684,000.00	0	0	4	11,684,000.00	2	2,314,400.00	0	1,063,900.00	1	2,244,400.00	1	3,438,300.00	100.00	77.55	4	9,061,000.00	100	77.55	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
08.01.01.1.03.06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	laporan	8	11,684,000.00	8	11,684,000.00	8	11,684,000.00	3	2,314,400.00	2	1,063,900.00	1	2,244,400.00	2	5,411,300.00	100.00	94.44	8	11,034,000.00	100	94.44	Badan Kesatuan Bangsa dan	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	90	19,910,000.00	75	19,890,000.00	80	19,910,000.00	10	880,000.00	20	2,090,000.00	20	3,850,000.00	30	7,909,000.00	100.00	73.98	80	14,729,000.00	88.89	73.98		
08.01.01.1.05.11	bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	orang/hr/keg	181	19,910,000.00	30	19,890,000.00	181	19,910,000.00	24	880,000.00	30	2,090,000.00	36	3,850,000.00	54	7,909,000.00	79.56	73.98	144	14,729,000.00	79.56	73.98	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	90	1,251,078,200.00	75	945,300,785.00	80	1,287,552,700.00	10	93,816,000.00	20	307,630,185.00	20	308,569,716.00	30	341,014,570.00	100.00	81.63	80	1,051,030,471.00	88.89	84.01		
08.01.01.1.06.01	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	paket	12	14,574,200.00	12	14,574,000.00	12	14,574,200.00	3	2,670,100.00	3	1,366,100.00	3	3,582,100.00	3	6,955,900.00	100.00	100.00	12	14,574,200.00	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
08.01.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	paket	36	345,505,000.00	36	149,155,000.00	36	343,076,000.00	0	0.00	18	160,875,000.00	10	126,200,000.00	8	55,000,000.00	100.00	99.71	36	342,075,000.00	100	99.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
08.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	paket	12	8,000,000.00	12	9,936,300.00	12	8,000,000.00	3	1,823,300.00	3	946,800.00	3	2,045,400.00	3	3,184,500.00	100.00	100.00	12	8,000,000.00	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan	
08.01.01.1.06.05	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	paket	12	25,000,000.00	12	28,770,200.00	12	27,529,500.00	3	4,717,200.00	3	2,409,100.00	3	6,845,400.00	3	13,557,700.00	100.00	100.00	12	27,529,400.00	100	110.12	Badan Kesatuan Bangsa dan	
08.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	paket	12	100,780,000.00	12	0.00	12	100,780,000.00	1	5,889,000.00	1	5,306,600.00	1	5,066,100.00	1	13,726,300.00	33.33	29.76	4	29,988,000.00	33.33	29.76	Badan Kesatuan	
08.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12	33,450,000.00	12	20,219,673.00	12	33,450,000.00	1	2,600,000.00	0	0.00	2	2,088,000.00	3	4,527,000.00	50.00	27.55	6	9,215,000.00	50.00	27.55	Badan Kesatuan	

08.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi	laporan	60	723,769,000.00	60	722,645,612.00	60	760,143,000.00	15	76,116,400.00	15	136,726,585.00	15	162,742,716.00	15	244,063,170.00	100.00	81.52	60	619,648,871.00	100	85.61	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	82.5	399,408,840.00	75	304,650,624.00	77.5	403,414,340.00	10	45,824,663.00	18	57,988,246.00	20	71,501,114.00	25	141,664,506.00	94.19	78.57	73	316,978,529.00	88.48	79.36		
08.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	laporan	12	200,408,840.00	12	126,950,624.00	12	200,408,840.00	3	19,424,663.00	2	18,988,246.00	2	18,717,514.00	2	58,181,406.00	75.00	57.54	9	115,311,829.00	75.00	57.54	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
08.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan	12	199,000,000.00	12	177,700,000.00	12	203,005,500.00	3	26,400,000.00	3	39,000,000.00	3	52,783,600.00	3	83,483,100.00	100.00	99.34	12	201,666,700.00	100	101.34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	%	67.5	233,560,000.00	60	200,581,065.00	62.5	241,680,000.00	10	23,368,000.00	10	18,989,560.00	20	63,581,818.00	20	103,580,500.00	96.00	86.69	60	209,519,878.00	88.89	89.71		
08.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	7	185,170,000.00	7	184,401,065.00	7	185,170,000.00	2	19,888,000.00	1	17,859,560.00	2	28,431,818.00	2	92,190,500.00	100.00	85.53	7	158,369,878.00	100	85.53	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	
08.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	unit	8	32,210,000.00	8	0.00	8	32,210,000.00	0	0.00		0.00	8	30,940,000.00	0	0.00	100.00	96.06	8	30,940,000.00	100	96.06	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
08.01.01.1.09.11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	100	16,180,000.00	100	16,180,000.00	100	24,300,000.00	6	3,480,000.00	4	1,130,000.00	20	4,210,000.00	60	11,390,000.00	90.00	83.17	90	20,210,000.00	90.00	124.91	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	
																Rata-rata program	93.38	84.30						
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	%	30	993,347,800.00	15	765,150,900.00	25	1,019,837,800.00	5	107,604,800.00	5	266,403,400.00	5	193,036,300.00	10	369,061,100.00	100.00	91.79	25	936,105,600.00	83.33	94.24		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	30	993,347,800.00	15	765,150,900.00	25	1,019,837,800.00	5	107,604,800.00	5	266,403,400.00	5	193,036,300.00	10	369,061,100.00	100.00	91.79	25	936,105,600.00	83.33	94.24		

08.01.02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	dokumen	12	26,347,500.00	9	15,130,000.00	12	26,347,500.00	3	9,965,000.00	3	4,087,300.00	3	0.00	3	8,114,400.00	100.00	84.13	12	22,166,700.00	100	84.13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	
08.01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah	dokumen	24	96,373,000.00	18	76,810,000.00	24	96,373,000.00	0	0.00	0	0.00	10	42,181,500.00	14	44,645,700.00	100.00	90.09	24	86,827,200.00	100	90.09	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	
08.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah	orang	2740	867,167,500.00	0	672,160,900.00	2740	867,167,500.00	773	97,639,800.00	540	262,316,100.00	474	150,854,800.00	953	289,811,000.00	100.00	92.33	2740	800,621,700.00	100	92.33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	
08.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah	laporan	15	3,459,800.00	15	1,050,000.00	15	29,949,800.00	0	0.00		0.00		0.00	15	26,490,000.00	100.00	88.45	15	26,490,000.00	100	765.65	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	
																Rata-rata program	100.00	88.75						

	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA	%	30	492,819,000.00	15	222,531,500.00	25	516,799,000.00	5	13,252,500.00	5	8,030,500.00	5	137,015,000.00	10	276,373,400.00	100.00	84.11	25	434,671,400.00	83.33	88.20		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	%	30	492,819,000.00	15	222,531,500.00	25	516,799,000.00	5	13,252,500.00	5	8,030,500.00	5	137,015,000.00	10	276,373,400.00	100.00	84.11	25	434,671,400.00	83.33	88.20		
08.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	dokumen	6	7,823,800.00	0	0	6	7,823,800.00	2	3,720,400.00	2	3,587,000.00	0	500,000.00	2	0.00	100.00	99.79	6	7,807,400.00	100	99.79	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	

08.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	dokumen	12	12,617,000.00	9	12,247,000.00	12	12,617,000.00	3	4,128,000.00	3	2,228,500.00	3	2,324,100.00	0	0.00	75.00	68.80	9	8,680,600.00	75.00	68.80	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	
08.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	orang	450	182,778,700.00	0	91,115,000.00	450	182,778,700.00	0	0.00	0	0.00	375	101,952,700.00	75	63,567,300.00	100.00	90.56	450	165,520,000.00	100	90.56	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	
08.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	orang	1230	283,399,500.00	0	114,069,500.00	1230	283,399,500.00	75	3,674,700.00	50	1,225,000.00	375	28,757,600.00	600	212,806,100.00	89.43	86.97	1100	246,463,400.00	89.43	86.97	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	

08.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	laporan	15	6,200,000.00	15	5,100,000.00	15	30,180,000.00	2	1,729,400.00	1	990,000.00	2	3,480,600.00	0	0.00	33.33	20.54	5	6,200,000.00	33.33	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	
																Rata-rata program	79.55	73.33						
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	%	30	158,433,000.00	15	143,831,000.00	25	188,433,000.00	5	27,676,400.00	5	44,234,900.00	5	34,480,000.00	10	62,155,700.00	100.00	89.45	25	168,547,000.00	83.33	106.38		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	%	30	158,433,000.00	15	143,831,000.00	25	188,433,000.00	5	27,676,400.00	5	44,234,900.00	5	34,480,000.00	10	62,155,700.00	100.00	89.45	25	168,547,000.00	83.33	106.38		
08.01.04.2.01.03	pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas pemberdayaan ormas evaluasi dan mediasi sengketa ormas pengawasan ormas dan ormas asing daerah	orang	495	136,833,000.00	0	124,831,000.00	495	136,833,000.00	120	27,676,400.00	150	44,234,900.00	100	12,880,000.00	100	44,581,700.00	94.95	94.55	470	129,373,000.00	94.95	94.55	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	
08.01.04.2.01.05	pelaksanaan monitoring dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas evaluasi dan mediasi sengketa ormas pengawasan ormas dan ormas asing daerah	laporan	15	21,600,000.00	15	19,000,000.00	15	51,600,000.00	-	-	-	-	7	21,600,000.00	6	17,574,000.00	86.67	75.92	13	39,174,000.00	86.67	181.36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	
																Rata-rata program	90.81	85.23						

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	%	30	614,593,000.00	15	365,389,000.00	25	1,214,593,000.00	5	74,714,000.00	5	188,814,500.00	5	21,600,000.00	10	694,633,400.00	100.00	80.67	25	979,761,900.00	83.33	159.42		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	30	614,593,000.00	15	365,389,000.00	25	1,214,593,000.00	5	74,714,000.00	5	188,814,500.00	5	21,600,000.00	10	694,633,400.00	100.00	80.67	25	979,761,900.00	83.33	159.42		
08.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di	orang	1370	592,993,000.00	0	343,389,000.00	1370	592,993,000.00	353	74,714,000.00	460	188,814,500.00	0	0.00	550	316,616,600.00	99.49	97.83	1363	580,145,100.00	99.49	97.83	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	
8.01.1.05.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di	orang	0	0.00	0	0.00	800	497,200,000.00	0	0.00		0.00		0.00	800	331,600,000.00	100.00	66.69	800	331,600,000.00	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	
08.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di	laporan	15	21,600,000.00	15	22,000,000.00	15	124,400,000.00	0	0.00		0.00	2	21,600,000.00	8	46,416,800.00	66.67	54.68	10	68,016,800.00	67	314.89	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	
																Rata-rata program	88.72	73.07						

	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	%	30	1,217,332,600.00	15	108,039,217.00	25	1,243,822,600.00	5	71,365,500.00	5	157,163,200.00	5	122,754,800.00	10	822,568,100.00	100.00	94.37	25	1,173,851,600.00	83.33	96.43		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	%	30	1,217,332,600.00	15	108,039,217.00	25	1,243,822,600.00	5	71,365,500.00	5	157,163,200.00	5	122,754,800.00	10	822,568,100.00	100.00	94.37	25	1,173,851,600.00	83.33	96.43		
08.01.06.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik	dokumen	2	100,000,000.00	0	0	2	100,000,000.00	0	0.00		0.00		0.00	2	100,000,000.00	100.00	100.00	2	100,000,000.00	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	
08.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik	orang	950	395,827,400.00	0	27,206,900.00	950	395,827,400.00	0	0.00	225	79,968,300.00	100	46,849,700.00	625	269,009,400.00	100.00	100.00	950	395,827,400.00	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	

08.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta	orang	1200	391,225,600.00	0	77,347,067.00	1200	391,225,600.00	220	71,365,500.00	0	0.00	225	75,905,100.00	750	235,955,000.00	99.58	97.96	1195	383,225,600.00	100	97.96	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	
08.01.06.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta	laporan	15	4,133,600.00	15	3,485,250.00	15	30,623,600.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	15	30,623,600.00	100.00	100.00	15	30,623,600.00	100	740.85	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	
08.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	dokumen	4	326,146,000.00	0	0	4	326,146,000.00	0	0.00	1	77,194,900.00		0.00	3	186,980,100.00	100.00	81.00	4	264,175,000.00	100	81.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	
														Rata-rata program		99.92	95.79							
														Rata-rata keseluruhan		92.06	83.41							

BAB IV

HAMBATAN DAN KENDALA

A. HAMBATAN DAN KENDALA

Tidak ada hambatan dan kendala dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan periode bulan Januari s.d. Desember 2022 (triwulan IV), pelaksanaan kegiatan s.d. triwulan IV telah sesuai dengan rencana aksi program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2022

B. UPAYA PEMECAHAN MASALAH

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan periode bulan Januari s.d. Desember 2022 (triwulan IV) sudah sesuai dengan Rencana Aksi yang telah disepakati dan ditetapkan.

BAB V

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Dalam kurun waktu Triwulan IV Tahun Anggaran 2022 (Januari s.d. Desember 2022) realisasi Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung sebagai berikut:

Tabel V.1

**Realisasi Anggaran Triwulan IV Tahun 2022
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung**

No	URAIAN	PAGU DANA Rp.	REALISASI Rp.	SALDO Rp.
1	2	3	4	5
I	BELANJA	20.481.768.777,15	18.318.694.913	2.163.073.864,15
I	BELANJA OPERASI	20.138.692.777,15	17.976.619.913	2.162.072.864,15
	Belanja Pegawai	6.525.849.837,15	6.179.271.735	346.578.102,15
	Belanja Barang dan Jasa	5.907.842.940	5.027.978.578	879.864.362
	Belanja Hibah	7.705.000.000	6.769.369.600	935.630.400
II	BELANJA MODAL	343.076.000	342.075.000	1.001.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	343.076.000	342.075.000	1.001.000

B. REKOMENDASI

Dalam rangka peningkatan capaian kinerja dan realisasi keuangan, diharapkan pelaksana program, kegiatan dan sub kegiatan tetap berpedoman pada Rencana Aksi tahun 2022 yang telah disepakati dan ditetapkan.

Bandar Lampung, Januari 2023

KEPALA BADAN



Drs. M. FIRSADA, M. Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19670515 198901 1 001